TUJUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meningkatkan Perekonomian yang Tanggung Berbasis Potensi Lokal

SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meningkatkan Perekonomian Sektor Primer

Sasaran Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lorem Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran, kinerja administrasi dan pelaporan keuangan DPMPTSP

Sasaran Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

Tercukupinya dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun

Indikator :

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun

Sasaran Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Bagian Perencanaan

Sasaran Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator :
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Bagian Perencanaan

Sasaran Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator :

Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Indikator :
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Bagian Perencanaan

Sasaran Sub Kegiatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Bagian Perencanaan

Sasaran Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah

Indikator :

Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Indikator :
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator :
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator :
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Indikator :
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan/Material

Tersedianya Bahan/Material

Indikator :
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tercukupinya Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator :

Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator :
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel

Tersedianya Mebel

Indikator :
Jumlah Paket Mebel yuang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin

Indikator :
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator :
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tercukupinya Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator :

Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa surat Menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor

Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tercukupinya Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :

Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator :
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel

Indikator :
Jumlah Mebel yang Dipelihara

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator :
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator :
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Progtam
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pemenuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal

Indikator :

Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Program
Promosi Penanaman Modal

Peningkatan Jumlah Dokumen Kepeminatan Penanaman Modal di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Peningkatan Jumlah Dokumen Kepeminatan Penanaman Modal

Sasaran Kegiatan
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah

Indikator :

Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah

Sasaran Sub Kegiatan
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Resiko

Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Indikator :
Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Kegiatan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Tersusunnya Jumlah dokumen potensi investasi di daerah

Indikator :

Jumlah dokumen potensi investasi

Sasaran Sub Kegiatan
Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan

Indikator :
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi

Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Progtam
Pelayanan Penanaman Modal

Predikat penilaian pelayanan publik

Indikator :

Predikat penilaian pelayanan publik

Sasaran Kegiatan
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tersusunnya Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Indikator :

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Sasaran Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Indikator :
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Sub Bagian Promosi Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota

Indikator :
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota

Sub Bagian Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku

Sasaran Kegiatan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indikator :

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sasaran Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Indikator :
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Indikator :
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator :
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Kegiatan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Sasaran Sub Kegiatan
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam meresalisasikan Kegiatan Usahanya

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam meresalisasikan Kegiatan Usahanya

Indikator :
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha datam meresalisasikan Kegiatan Usahanya

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha

Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Indikator :
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Sub Kegiatan
Pengawasan Penanaman Modal

Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Impeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha

Indikator :
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Progtam
Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal

Terselenggaranya Penilaian Persentase data yang dicukupi dalam sektor Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi

Indikator :

Penyelenggaran Penilaian Persentase data yang dicukupi

Sasaran Kegiatan
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik

Indikator :

Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik

Sasaran Sub Kegiatan
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Indikator :
Jumlah Data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal